



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: <i>Courtesy Call</i>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Juni 2022
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Gedung Nusantara III Lantai 2
Acara	: 1. Pertemuan dengan Wakil Ketua <i>Indonesia - European Parliamentary Friendship Group</i> (IEPFG), Hon. Mr. Tomasz Poreba; 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Dr. Fadli Zon / Ketua BKSAP DPR RI (F-P.Gerindra/A-86)
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si/ Kepala Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral
Hadir	: 1. Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M./ Wakil Ketua BKSAP DPR RI (F-PDIP/A-178) 2. Putu Supadma Rudana, MBA./ Wakil Ketua BKSAP DPR RI (F-PD/A-563); 3. Dr. H. Mardani Ali Sera, M. Eng/ Wakil Ketua BKSAP (F.PKS/A-422); 4. Ir. Andreas Eddy Susetyo/ Ketua GKSB DPR-Parlemen Uni Eropa (F-PDIP/A-214); 5. Hon. Mr. Tomasz Poreba/ Wakil Wakil Ketua <i>Indonesia - European Parliamentary Friendship Group</i> (IEPFG); 6. Mr. Witold De Chevilly/ Direktur Eksekutif <i>New Direction</i> ; 7. Emilia H. Elisa/ Staf Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI; 8. Arum Pudyolaksono/ Staf KBRI Brussel; 9. Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil/ Kepala Biro KSAP dan Organisasi Internasional; 10. Tenaga Ahli BKSAP; 11. Sekretariat KSB Biro KSAP.

I. Pendahuluan

Dr. Fadli Zon/ Ketua BKSAP DPR RI (F-PGerindra/A-86) menerima kedatangan Wakil Ketua *Indonesia - European Parliamentary Friendship Group (IEPFG)*, Hon. Mr. Tomasz Poreba pada pukul 11.00 WIB dan pertemuan terbuka untuk umum.

II. Kesimpulan / Keputusan:

1. Ketua BKSAP menyampaikan terima kasih atas kedatangan Wakil Ketua *Indonesia - European Parliamentary Friendship Group (IEPFG)* ke Gedung DPR RI ditengah situasi saat ini. Pertemuan membahas berbagai hal terkait upaya meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Uni Eropa.
2. Hubungan bilateral antara Indonesia – Uni Eropa yang sudah terjalin dengan baik sejak 1988, semakin diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan Komprehensif atau *Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA)* pada 2009 dan mulai beraku pada 1 Mei 2014. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang telah berhasil menegosiasikan dan menandatangani PCA dengan EU (Uni Eropa).
3. Indonesia merupakan mitra dagang Uni Eropa terbesar ketiga setelah RRT dan Amerika Serikat, Uni Eropa juga menjadi mitra penting perubahan iklim melalui *transfer of green technology*, yang dilakukan melalui investasi di sektor pengolahan mineral dan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka mendukung transisi energi Indonesia yang sejalan dengan prinsip *SDGs* dan *Paris Agreement*.
4. Wakil Ketua IEPFG menyampaikan apresiasi atas pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR. Sebagai anggota dewan yang berasal dari Polandia, tentu pihaknya memahami banyak hal mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara-negara di Uni Eropa. Wakil Ketua IEPFG juga melihat masih banyaknya inisiatif dan potensi kerja sama antara kedua negara yang belum tergali secara utuh. Menurutnya, Indonesia sebagai negara strategis dan memiliki banyak kebijakan yang baru sehingga baik Indonesia dan Uni Eropa perlu saling bekerja sama dan membangun komunikasi yang lebih erat di masa mendatang.
5. Terkait isu deforestasi, Wakil Ketua IEPFG menilai Indonesia tentu memiliki banyak permasalahan terkait pembukaan lahan baru sehingga penebangan hutan atau deforestasi banyak terjadi. Namun setiap masalah tentu ada solusinya, sehingga hal itulah yang menjadi *concern* utama bagi Wakil Ketua IEPFG untuk membantu menemukan solusi terkait deforestasi.

6. Terkait *green policy*, Wakil Ketua IEPFG mengakui bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Anggota Parlemen Eropa memiliki kompleksitas sehingga tidak semua pihak dapat mendukung kebijakan hijau atau *Green Policy* tersebut. *Green Policy* yang sedang diterapkan saat ini dinilai memiliki berbagai kekurangan di berbagai sektor. Untuk itu, Anggota EU perlu lebih banyak mendiskusikan kendala-kendala yang terjadi secara internal terlebih dahulu, baru kemudian dapat memberi contoh kepada negara-negara lain untuk menerapkan kebijakan yang lebih hijau.
7. Sebagai politisi, Wakil Ketua IEPFG menyampaikan dan mengajak DPR RI selaku legislator atau perancang kebijakan untuk bersama-sama memikirkan lebih lanjut bagaimana kebijakan hijau tidak hanya dirancang untuk menjadi sebuah kebijakan, tetapi kebijakan yang benar-benar bermanfaat dan berdampak secara langsung bagi masyarakat.
8. BKSAP menyampaikan bahwa kebijakan hijau yang pro lingkungan saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, tetapi saat ini pemerintah juga sudah mulai mengatur atau mengeluarkan regulasi *carbon tax*. Kebijakan pemerintah yang sudah cukup baik saat ini, dinilai Ketua BKSAP, merupakan penanda bahwa Indonesia sudah siap akan pendekatan baru dari berbagai negara yang akan meningkatkan kerja sama, baik secara ekonomi, perdagangan, dan lingkungan.
9. Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon juga menyampaikan terkait Indonesia *Sustainably Palm Oil* sebagai *good will* bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk lebih meramah-lingkungkankan produk sawit Indonesia yang masih belum bisa memasuki pasar Uni Eropa. Meski demikian, pihak Indonesia menghargai segala kebijakan yang sudah dihasilkan oleh EU. Menurutnya, tidak ada ukuran kebijakan yang bisa cocok untuk semua pihak atau "*No size fits all*", namun diperlukan transportasi bersama.
10. Ketua GKSB Uni Eropa Ir. Andreas Eddy Susetyo menyampaikan terkait *carbon trading* dan berbagai upaya untuk menuju emisi nol atau *zero emmision*. Perlu ada *sharing* informasi terkait dengan *white paper* antar kedua negara. Sebagai negara yang masuk ke G20, tentu UE dan Indonesia perlu membahas dan duduk bersama terkait upaya dan kebijakan untuk menanggulangi perubahan iklim melalui berbagai kebijakan tidak hanya peralihan ke energi dari energi fosil menjadi terbarukan, pajak karbon, dan upaya deforestasi.
11. Terkait CEPA, terdapat hal penting terkait yang menjadi *key important issue* adalah rencana Indonesia untuk mengurangi ekspor mineral, tentu hal ini akan menyulitkan berbagai negara di dunia termasuk Uni Eropa. Andreas juga menyatakan bahwa pihaknya terus mendukung *people to people contact* sebagai hal penting bagi penguatan diplomasi kedua negara.

12. Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera memberikan *highlight* terkait kondisi demografi Indonesian yang terdiri dari banyak suku, agama, dan berbagai budaya lainnya. Hal itu tentu memiliki kesamaan dengan Uni Eropa yang memiliki anggota dari berbagai negara dengan berbagai budayanya. Untuk itu, tentu menjadi hal penting bagi Indonesia-Uni Eropa untuk saling bisa bekerja bersama-sama.
13. Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana menyampaikan adanya potensi kerja sama mengenai *sustainable environment*, misalnya saat pelaksanaan Nyepi menghasilkan lingkungan bersih meski hanya satu hari dalam satu tahun. Selain itu *subak* di Bali yang memanfaatkan alam dan gravitasi juga merupakan suatu kearifan lokal yang berlu untuk dicontoh. Untuk itu hal tersebut perlu mendapat perhatian dan promosi di negara-negara seperti Uni Eropa.
14. Pada akhir pertemuan, Ketua BKSAP juga sempat menyampaikan terkait keanggotaan dalam *IPU Task Force on the Ukraine Conflict* mewakili Asia-Pacific Group (APG). Pertemuan pertama *task force* telah dilakukan pada April 2022. Saat IPU di Bali, Maret lalu, pihak DPR juga telah bertemu berbagai pihak terkait dan dalam beberapa bulan mendatang akan ada pertemuan lanjutan di Moskwa, Rusia.

III. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 12.15 WIB.

Jakarta, 14 Juni 2022
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.
NIP. 197206221999032001